

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kinerja Keuangan Daerah

2.1.1.1 Definisi Kinerja Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut Halim (2007: 24), kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Menurut V. Wiratna (2017: 71), kinerja merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan bersama.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah hasil dari evaluasi terhadap kegiatan atau program yang digunakan sebagai salah satu ukuran untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

2.1.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Deddi dan Ayuningtyas (2011), berikut tujuan penilaian kinerja di sektor publik.

- a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
- b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
- c. Memperbaiki kinerja periode–periode berikutnya.
- d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*).
- e. Memotivasi pegawai.
- f. Menciptakan akuntabilitas publik.

Menurut Abdul dan Muhammad (2012), pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan.

2.1.1.3 Rasio Keuangan Sebagai Indikator Kinerja Keuangan

Menurut Nekky Rahmiyanti (2009:74-75) salah satu alat yang dapat digunakan dalam melakukan analisa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah analisa rasio yang secara luas telah digunakan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik masih sangat terbatas dikarenakan keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial.

Analisis rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi.

2.1.1.4 Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk kinerja keuangan daerah (mahmudi, 2016:140-142) yang meliputi:

a. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut mahmudi (2010:142) rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dikeluarkan daerah. Selain itu, tingkat kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi).

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Rasio Kemandirian Daerah

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

c. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Mahmudi, 2010:143).

Rasio efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektifitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat efektif : >100%
- Efektif : 100%
- Cukup Efektif : 90%-99%
- Kurang efektif : 75%-89%
- Tidak efektif : <75%

d. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (mahmudi, 2010:143).

Rasio efisiensi dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerah. Secara umum, nilai efisiensi PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat efisien : <10%
- Efisien : 10%-20%
- Cukup efisien : 21%-30%
- Kurang efisien : 31%-40%

- Tidak efisien : >40%

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim dan Kusufi, 2014:101). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, PAD adalah sesuatu yang diperoleh Pemerintah Daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.1.2.1 Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang:

- 1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- 2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor atau ekspor.

2.1.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

a. Hasil pajak daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda antara provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan dalam Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut aturan tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut.

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Pajak kendaraan di air
3. Bea balik nama kendaraan bermotor
4. Bea balik nama kendaraan di air
5. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
6. Pajak air permukaan
7. Pajak rokok

Selanjutnya jenis pajak kabupaten/kota tersusun dari pajak berikut.

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan c
7. Pajak lingkungan
8. Pajak mineral bukan logam dan batuan
9. Pajak parkir
10. Pajak sarang burung walet
11. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
12. BPHTB

b. Hasil retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi menurut Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

1. Restribusi jasa umum
2. Restribusi jasa usaha
3. Restribusi perizinan tertentu

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup (halim dan kusufi, 2014, 104):

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;

2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN; dan
 3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut (halim dan kusufi, 2014, 104-105).

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda restribusi
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
11. Pendapatan dari pengembalian
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
15. Hasil pengelolaan dana bergulir

2.1.3 Dana Perimbangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kelompok pendapatan dana perimbangan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

1. Dana bagi hasil

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :

- i. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- ii. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- iii. Pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21

Sedangkan dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam berasal dari :

- i. Kehutanan
- ii. Pertambangan umum
- iii. Perikanan
- iv. Pertambangan minyak bumi
- v. Pertambangan gas bumi
- vi. Pertambangan panas bumi

2. Dana alokasi umum

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 disebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.

3. Dana alokasi khusus

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.

Kriteria khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 Pasal 51 dirumuskan berdasarkan:

- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus; dan
- b. Karakteristik daerah.

Sedangkan kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Selanjutnya menteri teknis menyampaikan kriteria teknis kepada menteri keuangan.

2.1.4 Belanja Modal

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset (erlina, omar dan rasdianto, 2015:158).

Menurut Halim dan Kusufi (2014:107), kelompok belanja modal terdiri atas:

1. Belanja tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai (peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010).

2. Belanja peralatan dan mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, investasi kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap dipakai (peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010).
3. Belanja modal gedung dan bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai (peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010).
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai (peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010).
5. Belanja aset tetap lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai (peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010).
6. Belanja aset lainnya
Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010).

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukimo (2006:9) pertumbuhan ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Nanga (2005:273) pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa.

Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang melalui pertumbuhan ekonomi adalah tujuan pembangunan ekonomi setiap negara. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan, apabila tingkat kegiatan ekonomi

yang dicapai sekarang lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut bertambah besar dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam teori ekonomi pembangunan, dikemukakan ada enam karakteristik pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Terdapatnya laju kenaikan produksi perkapita yang tinggi untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang cepat.
2. Semakin meningkatnya laju produksi perkapita terutama akibat adanya perbaikan teknologi dan kualitas *input* yang digunakan.
3. Adanya perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa.
4. Meningkatnya jumlah penduduk yang berpindah dari pedesaan ke daerah perkotaan (urbanisasi).
5. Pertumbuhan ekonomi terjadi akibat adanya ekspansi negara maju dan adanya kekuatan hubungan internasional.
6. Meningkatnya arus barang dan modal dalam perdagangan internasional. (Jhingan,1995).

Dalam konsep dasar ekonomi makro indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, adalah produk domestik bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu (Mankiw, 2006). Dalam konsep regional Produk Domestik Bruto dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan usaha yang ada (Saggaf, 1999).

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, perubahan persediaan, ekspor dan impor. Sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$PED = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Di mana:

- PED = Pertumbuhan Ekonomi Daerah
 PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto Periode Tertentu
 PDRB_{t-1} = Produk Domestik Regional Bruto Periode Sebelumnya

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu dan mendukung penelitian ini, terutama dalam pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah untuk mengetahui sejauh mana perbedaannya dan sebagai perbandingan konsistensi penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu tentang kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi:

1. Junarwati, Basri, dan Abdullah (2013)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2010-2012 bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan komponennya yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, zakat, hasil investasi lokal, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempengaruhi kinerja keuangan kabupaten / kota di provinsi Aceh. Selanjutnya, hasil lainnya menunjukkan bahwa komponen pendapatan daerah: pajak daerah, retribusi daerah, zakat, hasil penanaman modal daerah, dan pendapatan daerah Lainnya secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten / kota di provinsi Aceh.

2. Pratini (2014)

Penelitian ini berjudul Analisis Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan pendapatan asli daerah, belanja modal dan dana alokasi umum non linier, positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

Selain itu, pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat secara statis negatif dan signifikan. Berbeda dengan pendapatan asli daerah perkembangan nilai realisasi belanja modal pemerintah jugamengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

3. Swastika Enjang Prasasti dan Ratna Purnama Sari (2013)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DIY tahun 2007-2013) bertujuan untuk menguji apakah pendapatan asli daerah (PAD) dan Saldo Dana berpengaruh

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di DIY. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan administrasi publik, teori organisasi dan pengetahuan akuntansi pemerintah. Penelitian ini juga dilakukan berdasarkan kinerja keuangan yang tidak optimal agar sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan laporan realisasi anggaran Kabupaten DIY pada tahun 2007-2013 yang diterbitkan oleh Dinas Perimbangan dan menggunakan 30 sampel data. Data dianalisis dengan metode kuantitatif dan diuji dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dan Saldo Dana memberikan efek simultanouse terhadap kinerja keuangan secara parsial, pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap saldo keuangan pemerintah berpengaruh negatif terhadap keuangan pemerintah. kinerja DIY.

4. Marianus manek dan Rudy Badrudin (2016)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2007-2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sampel dalam penelitian ini terdiri atas 21 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, runtut waktu dan data cross-sectional kabupaten/kota sejak tahun 2007 sampai dengan 2016. Data diolah dengan menggunakan varian berbasis SEM yang disebut WarpPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, dana perimbangan tidak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan.

5. Mulia Andirfa, Dr. Hasan Basri, M.com, CA dan Dr. M. Shabri A. Majid, SE, M.Ec (2016)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah, pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah, pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah, dan pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini yaitu 23 Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh yang telah memiliki data realisasi

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) periode 2011-2013. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dengan model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun hasil pengujian secara parsial menunjukkan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

6. Febrian Dwi Prakarsa (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan pengeluaran pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012. Penelitian ini menggunakan analisis data panel di setiap 37 Kabupaten kota yang ada di Jawa Timur tahun 2008-2012 juga dilakukan uji chow dan uji Hausman untuk menentukan data regresi yang akan dipakai dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari data sekunder dari BPS dan DJPK. Dari hasil analisis data panel *Random Effect Model* diperoleh bahwa PAD berpengaruh secara kurang signifikan dan berpengaruh negatif, sementara Belanja barang dan jasa berpengaruh secara positif dan signifikan, lalu belanja modal berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Juga dipaparkan bagaimana peneliti memberi solusi dan sarannya untuk pemerintah daerah berdasarkan teori yang sudah ada.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Model Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Junarwati, Basri, dan Abdullah (2013) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2010-2012”	Variabel independen: X1: Pendapatan Asli Daerah Variabel dependen: Y: Kinerja Keuangan Daerah	Regresi linear berganda	<ul style="list-style-type: none"> – Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2010-2012. – Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Zakat, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh secara bersama-sama dan sendiri-sendiri terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2010-2012. 	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pada penelitian terdahulu terdapat variabel independen pendapatan asli daerah sama dengan penelitian ini. – Variabel dependen pada penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu. <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Objek pada penelitian terdahulu terletak pada provinsi aceh sedangkan pada penelitian ini terletak pada provinsi jawa timur. – Pada penelitian ini terdapat variabel independen lainnya seperti dana perimbangan dan belanja modal.
2.	Prantini (2014) “Analisis Pendapatan Asli Daerah, Belanja	Variabel Independen: X1: Pendapatan Asli Daerah	Analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> – Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum adalah 	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pada penelitian terdahulu terdapat variabel

	<p>Modal, Dan Dana Alokasi Umum(DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Barat”</p>	<p>X2: Belanja Modal X3: Dana Alokasi Umum Variabel Dependen: Y: Pertumbuhan Ekonomi</p>		<p>non linear, positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat secara statistik positif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap perekonomian Kalimantan Barat sangatlah penting. Selama ini Pemerintah Daerah belum optimal dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan nilai PAD. - Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat secara statistik negatif dan signifikan. Berbeda dengan PAD, perkembangan nilai realisasi Belanja Modal pemerintah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Besarnya nilai dorongan belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi 	<p>independen pendapatan asli daerah, belanja modal yang sama dengan penelitian ini</p> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objek pada penelitian terdahulu terletak pada provinsi kalimantan barat sedangkan pada penelitian ini terletak pada provinsi jawa timur. - Pada penelitian ini terdapat variabel independen lainnya seperti dana perimbangan
--	---	--	--	--	---

				<p>Kalimantan Barat, ternyata berbanding terbalik dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi. Ini menunjukkan bahwa peranan penanaman modal oleh pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat cukup penting walaupun elastisitas yang terjadi relatif kecil apabila dibandingkan dengan perubahan acak yang lainnya.</p>	
3.	<p>Swastika Enjang Prasasti dan Ratna Purnama Sari(2013) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD) Dan Dana Pertimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DIY Tahun 2007-2013)”</p>	<p>Variabel Independen: X1: Pendapatan Asli Daerah X2: Dana Pertimbangan Variabel Dependen: Y: Kinerja Keuangan</p>	<p>Regresi linier</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yog-yakarta (DIY) padatahun 2007-2013. – Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007-2013. – Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pada penelitian terdahulu terdapat variabel independen pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sama dengan penelitian ini. – Variabel dependen pada penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu. <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Objek pada penelitian terdahulu terletak pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DIY

				kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) padatahun 2007-2013	sedangkan pada penelitian ini terletak pada provinsi jawa timur. – Pada penelitian ini terdapat variabel independen lainnya seperti belanja modal.
4.	Marianus manek dan Rudy badrudin (2016)“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di provinsi nusa tenggara timur tahun 2007-2016”	Variabel Independen: X1: Pendapatan Asli Daerah X2: Dana Pertimbangan Variabel Dependen: Y: Pertumbuhan ekonomi	SEM berbasis Varians yaitu WarpPLS	<ul style="list-style-type: none"> – PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini bermakna bahwa kenaikan PAD dapat memacu dan memicu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun sebelumnya. PAD berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Ini bermakna bahwa peningkatan PAD berperan dalam pengentasan kemiskinan absolut di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. – Dana Perimbangan berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini bermakna bahwa dana perimbangan belum dialokasikan secara maksimal pada pembangunan 	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pada penelitian terdahulu terdapat variabel independen pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sama dengan penelitian ini. <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Objek pada penelitian terdahulu terletak pada provinsi nusa tenggara timur sedangkan pada penelitian ini terletak pada provinsi jawa timur. – Pada penelitian terdahulu tidak terdapat kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen – Pada penelitian ini terdapat variabel independen lainnya seperti belanja modal.

				<p>infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana Perimbangan berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap kemiskinan. Ini bermakna bahwa pengelolaan keuangan daerah belum ideal dan penganggaran daerah belum merefleksikan preferensi masyarakat dan kapasitas institusi lokal.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap kemiskinan. Ini bermakna bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut belum mencerminkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan padat tenaga kerja, namun cenderung pertumbuhan ekonomi eksklusif dan padat modal.	
--	--	--	--	--	--

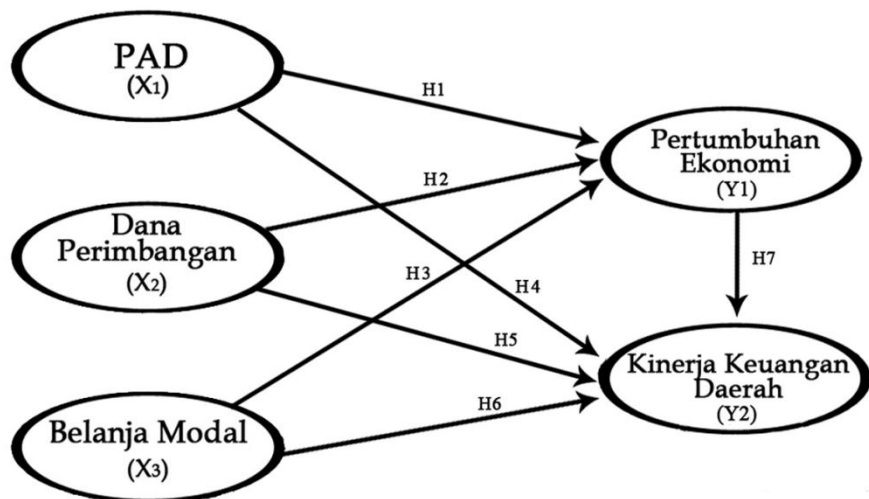
5.	Mulia Andirfa, Dr. Hasan Basri, M.com,CA dan Dr. M. Shabri A. Majid, SE, M.Ec (2016)“Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di provinsi aceh”	Variabel Independen: X1: Belanja modal X2: Dana Perimbangan X3: Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen: Y: Kinerja keuangan	Regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> – Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. – Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada. – Namun hasil pengujian variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. 	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pada penelitian terdahulu terdapat variabel independen belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah yang sama dengan penelitian ini. – Variabel dependen pada penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu. <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Objek pada penelitian terdahulu terletak pada provinsi aceh sedangkan pada penelitian ini terletak pada provinsi jawa timur.
6.	Febrian Dwi Prakarsa (2014) “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan	Variabel Independen: X1: Pendapatan Asli Daerah X2: Pengeluaran Pemerintah Daerah Variabel Dependen: Y: Pertumbuhan	Regresi	<ul style="list-style-type: none"> – Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara tidak signifikan dan berdampak secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis awal 	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pada penelitian terdahulu terdapat variabel independen pendapatan asli daerah yang sama dengan penelitian ini.

	<p>Ekonomi (Studi Kasus Di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008- 2012)</p>	<p>Ekonomi</p>		<p>yang menyatakan adanya hubungan antar variabel. Ini juga memperlihatkan bahwa penarikan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan pemerintah daerah justru menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel Belanja Barang dan Jasa berpengaruh secara signifikan dan berdampak secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan adanya hubungan antar variabel. Ini juga memperlihatkan bahwa pelayanan publik yang tertuang dalam pengeluaran Belanja Barang dan Jasa ikut mempengaruhi tingkat Pertumbuhan Ekonomi daerah itu sendiri. - Variabel Belanja Modal berdampak secara signifikan dan negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan 	<p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada penelitian terdahulu tidak terdapat kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. - Pada penelitian terdahulu tidak terdapat variabel independen lainnya seperti belanja modal dan dana perimbangan.
--	--	----------------	--	---	--

				<p>hipotesis awal yang menyatakan adanya hubungan antar variabel. Ini juga memperlihatkan bahwa kurang efektifnya Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah untuk menunjang sektor perekonomian daerah masih belum maksimal.</p>	
--	--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan dalam landasan teori dan penelitian terdahulu yang menguji tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Daerah, maka dapat digambarkan suatu kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Keterangan:

X1: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2: Dana Perimbangan

X3: Belanja Modal

Y1: Pertumbuhan Ekonomi

Y2: Kinerja Keuangan

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konsep yang disusun dalam penelitian ini, maka hipotesis atau dugaan awal penelitian adalah sebagai berikut :

H1 = PAD berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

H2 = Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

H3 = Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

- H4 = PAD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah
- H5 = Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah
- H6 = Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah
- H7 = Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah